

EKSISTENSI DAN PERANAN SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL - POLITIK

Oleh: Tasman Hamami

Pendahuluan

Beberapa orang tokoh seperti Ivan Illich dengan karyanya *Deschooling Society* maupun Paulo Freire sudah meragukan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam mempersiapkan generasi masa depan. Tetapi sebagian besar masyarakat, nampaknya tetap menaruh harapan besar dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem persekolahan sebagai pusat pendidikan. Bahkan ada semacam kecenderungan bahwa sekolah sebagai taruhan, sementara di sisi lain, seperti sistem pondok pesantren relatif kurang diminati masyarakat jika dibandingkan dengan sekolah.

Sikap dan pandangan seperti itu muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan perubahan masyarakat yang terjadi. Sebagai masyarakat yang sedang bergerak ke arah kehidupan moderen dihadapkan pada peningkatan tuntutan kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, dan juga kesehatan. Dalam kenyataannya, "orang-orang sekolahan" lebih banyak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akibatnya, fenomena itu yang juga merupakan fenomena masyarakat moderen telah memusatkan perhatian masyarakat terhadap peranan sekolah. Bahkan kecenderungan seperti itu telah menempatkan harapan masyarakat yang terlalu besar terhadap persekolahan, mereka mengira bahwa sekolah mampu membereskan segala persoalan.

Memperhatikan kecenderungan tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah persoalannya, terutama berkaitan dengan eksistensi dan peranan sekolah dalam perkembangan kehidupan sosial dan politik.

Timbulnya Sistem Sekolah

Sekolah merupakan pusat pendidikan, di samping keluarga dan masyarakat. Secara historis, sekolah timbul sebagai manifestasi dari

tuntutan masyarakat yang berubah dan berkembang, sehingga berdirinya sekolah-sekolah itu dipandang sebagai fenomena masyarakat modern.¹⁾ Dalam konteks ini, memang terjadi hubungan timbal-balik antara masyarakat modern di satu pihak, dengan sistem persekolahan di pihak lain. Artinya, pola hidup masyarakat modern telah menuntut kehadiran sekolah, atau sebaliknya, kehadiran sekolah akan melahirkan masyarakat modern.

Sebagai contoh, kita dapat menelaah fenomena yang terjadi di Athena. Pendidikan di Athena pada mulanya bersifat tutorial, yaitu dalam bentuk hubungan perorangan. Tetapi ketika Athena menjadi lebih demokratis, secara berangsur-angsur hubungan tutorial diganti dengan pengajaran kelompok/klasikal.²⁾ Pengajaran klasikal dengan seperangkat ketentuan yang ada pada hakekatnya merupakan karakteristik bentuk pendidikan yang lazim disebut sekolah. Dalam hal ini rupanya sekolah dihadirkan sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Tetapi pada gilirannya, justru kehadiran sekolah akan mendorong masyarakat ke arah pola hidup modern. Di sini nampak adanya hubungan yang bersifat reflektif antara perkembangan masyarakat dengan sekolah.

Dalam masyarakat yang sederhana, tujuan belajar adalah sekedar untuk dapat melaksanakan hidup sesuai dengan tuntutan masyarakatnya yang juga sederhana. Ketika masyarakat berkembang, maka semakin berkembang dan banyakuntutannya terhadap para anggota kelompoknya, sehingga mereka harus banyak belajar sesuai dengan tuntutan itu. Sebaliknya, masyarakat dituntut oleh anggotanya untuk menyediakan sarana, waktu, dan pembimbing bagi berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar.³⁾ Tugas mengajar yang pertama-tama adalah kepala keluarga. Dalam perkembangannya, kepala suku memegang peranan dalam tugas tersebut, dan selanjutnya orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu dalam masyarakat. Sejak itu terjadilah hubungan antara orang yang memiliki kelebihan dan masyarakat yang memerlukannya untuk kepentingan belajar. Orang-orang yang memiliki kelebihan itu lazim dipanggil guru, sedang yang menuntut kelebihan disebut murid. Perkembangan selanjutnya, hubungan guru-murid

¹⁾ M. Amien Rais, dkk.(editor), *Pendidikan Muhammadiyah Dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hal. 100

²⁾ Everett Reimer, *Sekitar Eksistensi Sekolah*, (terjemahan: M. Soedomo), (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1987), hal. 45.

³⁾ Yusuf Jayadisastra, et al., (editor), *Administrasi pendidikan*, (Bandung: Proyek BPG Tertulis, 1982), hal. 90.

menentukan aturan-aturan tertentu, seperti; tempat, waktu, apa yang harus dilakukan oleh guru dan murid, dan juga bagaimana cara melakukannya. Proses hubungan guru-murid dengan seperangkat ketentuan tersebut berlangsung secara terus-menerus, sehingga lembaga dan kemudian lembaga itu disebut sekolah.

Eksistensi Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan

Rupert C. Lodge melukiskan hidup sebagai pendidikan, dan pendidikan adalah hidup (*life is education, and education is life*), artinya seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan.⁴⁾ Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan. Dan dalam masyarakat modern, pendidikan telah menjadi variabel kehidupan yang demikian penting sehingga merupakan kebutuhan hidup.

Proses pendidikan itu berlangsung melalui tiga sentra, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tiga sentra pendidikan itu pada keekatnya merupakan satu kesatuan, tidak terpisah satu sama lain. Mungkin karena sifatnya yang formal, pendidikan pada sentra sekolah ternyata lebih sistematis, sehingga lebih banyak diperankan dari pada sentra lainnya.

Sekolah sebagai suatu sistem, merupakan pendidikan yang telah terstandarisir sedemikian rupa, paling tidak di dalam wujud legalitas formalnya. Seluruh aspek-aspeknya, seperti; jenjangnya, lama belajarnya, paket kurikulumnya, persyaratan usia dan tingkat kemampuan muridnya, prosedur evaluasinya, sekuensi penyajian materinya, serta organisasi dan pengelolaannya telah terstandarisir. Sistem yang demikian itu diharapkan akan mewujudkan proses pendidikan yang efisien dan hasil yang efektif. Dengan kata lain, sekolah diharapkan mencapai tingkat produktivitas pendidikan yang tinggi, sehingga mampu memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis, sistem persekolahan telah terbukti memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi kemajuan masyarakat. Mengapa demikian? Karena sekolah memiliki organisasi dan pengelolaan yang sistematis, sehingga memungkinkan untuk memberikan pelayanan belajar yang lebih baik. Mungkin karena itulah maka sekolah menjadi tumpuan harapan masyarakat sebagai lembaga yang memberikan bekal

⁴⁾ Departemen Agama RI., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, 1974), hal.11.

pengetahuan maupun pembentukan kepribadian murid. Everett Reimer.⁵⁾ merumuskan empat fungsi sekolah, yaitu sebagai; custodial care, (semacam perwalian), pemilihan peranan sosial, indoktrinasi, dan pendidikan. Jika keempat fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terpadu, maka sekolah akan merupakan alat yang efektif untuk pengendalian sosial.

Sekolah Dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Masyarakat semakin besar harapannya terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan, sebab sekolah dinilai sebagai lembaga pendidikan yang paling efektif dan menjanjikan prospek kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan modern. Bahkan sekolah dipandang sebagai simbol masyarakat modern. Keduanya memiliki pola hubungan yang bersifat reflektif. Sekolah hadir sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang, dan sekolah turut mendorong perkembangan masyarakat. Tetapi, sejauh mana peranan sekolah dalam mengembangkan aspek kehidupan sosial?

Persoalan itu akan ditelaah berdasar suatu asumsi bahwa masyarakat bergerak dari taraf tradisional kepada taraf modern. Dalam proses perubahan ini, pendidikan berperan mengenalkan dan memantapkan masyarakat agar para warganya mempunyai sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan norma dan nilai modern.⁶⁾ Institusi yang dominan dalam menciptakan perubahan tersebut ialah sekolah, sehingga sekolah merupakan inspirasi masyarakat dan pusat kebudayaan masyarakat dalam berbagai aspek, terutama dalam sikap dan tingkah laku modern. Menurut Alex Inkeles dan David H. Smith, perubahan masyarakat ke arah modern ditandai dengan penerimaan para warganya terhadap sikap, nilai-nilai serta kepercayaan yang dapat digolongkan modern.⁷⁾ Perwujudan dari penerimaan tersebut berupa: (i) terbuka terhadap pengalaman baru; (ii) memiliki kesiapan terhadap adanya perubahan sosial; (iii) memiliki kesadaran akan adanya keaneka-ragaman sikap dan tingkah laku serta pendapat-pendapat yang ada di sekelilingnya, (iv) bersikap progresif mencari dan memahami fenomena dan informasi baru untuk dijadikan pandangan sendiri, dan (v) berorientasi pada masa depan.

⁵⁾ Imam Bernadib, *Pendidikan Perbandingan, Buku Dua Persekolahan Dan Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987) hal.11.

⁶⁾ *Ibid.*, hal. 48.

⁷⁾ *Ibid.*, hal. 45

Pada hakekatnya, sekolah sebagai sentra pendidikan juga merupakan lembaga sosial. Artinya, sekolah yang sejati menjadi kekuatan sosial. Para warga masyarakat memasuki sekolah untuk memasuki masyarakat; mereka dididik untuk menciptakan atau menciptakan kembali masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan (sekolah) secara kritis harus menyadarkan warga masyarakat akan realita, sehingga warga masyarakat tersebut mampu bertindak menyesuaikan diri secara efektif terhadap lingkungan yang selalu berkembang dan berubah. Dengan demikian, maka warga masyarakat yang terdidik akan memahami dunianya dan dapat menghadapi persoalannya secara efektif. Kemampuan semacam itulah yang disebut *empati psikologik*.

Kiranya tidak dapat diingkari bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan (formal) memiliki peranan yang demikian besar terhadap pembentukan sikap dan tingkah laku modern warga masyarakat. Akan tetapi tidak berarti bahwa sekolah merupakan satu-satunya yang berperanan dalam pembentukan sikap dan tingkah laku individu. Sebab dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai institusi maupun komunitas yang tidak kecil dan peranannya dalam proses pembentukan sikap dan perilaku. Bahkan menurut Yaspan C. Warrouw, justru segi kehidupan yang sifatnya tidak formil, seperti keluarga, tempat pekerjaan, dan berbagai aktivitas sosial lain memiliki daya pengaruh yang lebih besar.⁸⁾

Yoseph R. Gusfield menyarankan agar tesis yang menyatakan bahwa sekolah berperanan besar dalam proses modernisasi masyarakat untuk ditelaah lebih lanjut. Dia juga merekomendasi agar pola pikir yang dikotomis antara apa yang disebut tradisional dan apa yang disebut modern tidak dikembangkan untuk memahami peranan sekolah. Sebab dalam kenyataannya, dalam suatu masyarakat dapat menerima sejumlah norma dan nilai modern dengan tetap mempertahankan norma dan nilai tradisional, sebagai contoh adalah yang terjadi di Jepang. Jepang adalah sebagai negara maju dan modern, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dengan kata lain, untuk mencapai masyarakat yang modern tidak selalu harus menghilangkan nilai tradisional.

Untuk itu, dalam menelaah peranan sekolah dalam aspek kehidupan sosial dapat didasarkan pada teori investasi manusiawi, teori struktural fungsional, mobilitas isi, teori sosialisasi, teori alokasi dan legitimasi.⁹⁾

⁸⁾ Yaspan C. Warrouw, *Pendidikan Sosial Dan Masyarakat*, (Bandung: Lemmars, 1980), hal. 4.

⁹⁾ Imam Barnadib, *op-cit.* hal. 55.

Menurut teori investasi manusiawi, manusia dipandang sebagai faktor paling strategis dalam pengembangan aspek sosial. Karena itu manusia harus diberi kesempatan memperoleh pendidikan agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sehingga kemampuan-kemampuan yang bersifat potensial akan menjadi aktual dan pada gilirannya akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan aspek kehidupan sosial dalam berbagai seginya. Secara ideal masyarakat yang terdidik itu akan naik martabatnya dengan mobilitas sosial. Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa pengangguran tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, teori ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas.

Teori fungsionalisme struktural memiliki tesis yang berbeda dengan teori investasi manusiawi. Menurut teori ini, masyarakat dilukiskan sebagai kelompok-kelompok yang memiliki saling ketergantungan dan keseimbangan. Masyarakat akan maju bila masing-masing kelompoknya dikembangkan melalui pendidikan. Teori ini sejalan dengan pendekatan tuntutan sosial dalam pendidikan yang lebih mementingkan pemerataan kesempatan atau kuantitatif daripada kualitatif yang manifestasinya menetapkan wajib belajar sebagai wahana yang tepat.

Lebih jauh teori ini merekomendasikan perlunya pengembangan kelompok masyarakat melalui jalur pendidikan vokasional atau profesional. Pemikiran ini memiliki kesamaan dengan konsep *link and match* yang dikembangkan sebagai kebijaksanaan pendidikan profesional di Indonesia pada PJPT II. Namun demikian, dalam realita pendidikan akan mengalami masalah besar yaitu: profesionalisasi tenaga kerja dan kesempatan kerja. Sebab jika tenaga profesional telah tersedia sebagai tenaga kerja sedang dunia kerja tetap terbatas, maka akan terjadi penganggur-penganggur profesional.

Dalam konteks ini, kiranya teori alokasi dan legitimasi dapat dikembangkan sebagai suatu alternatif. Kedua teori ini menghendaki adanya referensi yang jelas mengenai sistem pendidikan dan struktur masyarakat. Pendidikan juga perlu mengupayakan penyiapan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan strategis kedudukannya dalam masyarakat dalam memacu perkembangannya.¹⁰⁾ Teori-teori tersebut pada hakekatnya ingin menunjukkan peranan pendidikan, terutama sekolah, dalam proses perkembangan masyarakat.

Sekolah Dan Pengembangan Kehidupan Politik

Hubungan antara sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan pengembangan kehidupan politik dapat dijelaskan, bahwa pendidikan

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 59.

Pada umumnya dan sekolah khususnya ikut memberikan sumbangan dalam peningkatan mobilitas dan partisipasi politik para muridnya. Sementara di pihak lain, sistem politik akan memberi arah dan corak suatu pendidikan, terutama sekolah.

Perkembangan kehidupan politik berarti tercapainya suatu sistem politik, dan indikasinya terlihat pada terwujudnya pelembagaan politik yang meliputi; integrasi dengan pola-polanya dan partisipasi serta distribusi sumber-sumber yang bersifat politik secara adil dan nyata.¹¹⁾ Integrasi berarti kemampuan suatu negara untuk menumbuhkan kesatuan dan solidaritas di antara warga negaranya sehingga timbullah dengan jelas identitas nasional di atas segalanya. Sedang partisipasi berarti peningkatan mobilitas politik, sehingga sebagian besar masyarakat mempunyai kesempatan yang wajar, kebebasan bersyariat, berbicara maupun mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan politik.

Kedua pola pelembagaan perkembangan sistem politik tersebut terdapat di setiap negara. Untuk melihat bagaimana sekolah berperanan besar dalam proses pelembagaan perkembangan sistem politik, kiranya tesis Jujun S. Suriasumantri dapat dirujuk. Dia menegaskan bahwa ilmu merupakan alat untuk mewujudkan tujuan politis secara efektif dan efisien yang menunjang tumbuhnya demokrasi. Sedang sikap politik normal ilmuwan yang berorientasi kepentingan nasional menunjang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.¹²⁾ Sikap politik yang konstruktif ini dapat berkembang apabila diberi atmosfer yang kondusif, terutama kemauan politik (*political will*) masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, pendidikan politik, terutama sekolah mempunyai peranan yang besar.

Sekolah mempunyai peranan dalam proses sosialisasi politik, seleksi dan latihan kelompok elite politik, integrasi politik, maupun pembentukan kesadaran politik nasional. Pada hakekatnya, sekolah bukan satu-satunya lembaga yang berperan dalam sosialisasi politik, tetapi oleh para pemerhati sekolah dinilai mempunyai peranan terbesar. Sekolah dalam sosialisasi politik lebih bersifat penanaman pengetahuan daripada tingkah laku dan perbuatan.

Peranan sekolah juga dapat dilihat dalam pembentukan elite politik, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Elite politik merupakan kelompok yang memegang kekuasaan dan mempunyai

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 68.

¹²⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*, Jakarta : PT. Gramedia, 1986), hal. 12.

peranan penting dalam menggerakkan masyarakat dalam arti politik. Di negara-negara maju peranan pendidikan nampak dalam proses seleksi pemimpin. Tampilnya tokoh dan pemimpin seringkali menunjukkan kaitannya dengan jenis sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Pendidikan memang bukan satu-satunya yang berperanan dalam proses tersebut, tetapi sesuai dengan taraf pendidikan universal, ternyata kelompok elite politik dalam masyarakat tentulah orang-orang yang berpendidikan.

Peranan sekolah dalam integrasi dan pembentukan kesadaran politik nasional tidak dapat dinilai kecil. Sebab upaya pengembangan integrasi dan pembentukan kesadaran politik nasional tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Pengembangan integrasi dan pembentukan kesadaran politik nasional meliputi aspek; pengetahuan, kesadaran dan sikap yang serasi mengenai sejumlah ide, norma dan nilai yang merupakan landasan, ciri dan kepribadian bangsa. Aspek-aspek ini perlu dikembangkan secara efektif melalui pendidikan, utamanya sekolah. Nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada para murid tidak harus ditampilkan dalam bentuk tersendiri. Dalam proses pelajaran dan pendidikan di sekolah nilai-nilai itu dapat diluluhkan dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan. Di samping itu juga diluluhkan dalam tindak langkah sehari-hari para pendidik sendiri, maupun dijiwakan dalam seluruh cara penyelenggaraan sekolah.¹³⁾

Pengembangan integrasi dan pembentukan kesadaran politik di sekolah tidak terbatas pada pemahaman verbalistik. Tetapi dapat diorientasikan lebih jauh yaitu menjangkau pemahaman murid tentang sistem politik dan masalah-masalahnya serta kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Melihat uraian di atas, kiranya jelas bahwa sekolah mempunyai peranan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam aspek sosial dan politik. Kedua aspek tersebut ternyata merupakan variabel pokok yang mendominasi seluruh kehidupan kita. Sehingga sebagian besar masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap sekolah, dapat dinilai realistis, setidak-tidaknya untuk ukuran waktu sekarang. Tetapi, apakah dengan menumpahkan harapan kita kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan berarti selesai masalah? Kiranya persoalan tersebut masih perlu ditelaah.

¹³⁾ *Ibid.*, hal. 344.

Hakekat Pendidikan, Suatu Refleksi

Porsi perhatian dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang demikian besar pada dekade terakhir ini, nampaknya merupakan fenomena yang muncul sebagai salah satu konsekuensi logis dari perubahan dan perkembangan masyarakat dari tradisional kepada modern. Ketika masyarakat berada pada pola tradisional yang karakteristiknya berupa kesederhanaan, hajat akan sekolah juga masih sederhana. Namun ketika pola itu berubah menjadi apa yang disebut modern, ternyata konsep masyarakat tentang kehidupan mulai berubah. Perubahan konsep masyarakat tentang kehidupan itu, selanjutnya merubah konsepnya tentang pendidikan dan tujuannya.

Pada dasarnya, perhatian masyarakat terhadap sekolah khususnya, dan pendidikan pada umumnya dapat dipahami sebagai indikasi kemajuan masyarakat. Sebab tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran kemajuan. Akan tetapi, menaruh kepercayaan yang terlalu besar, dan bahkan mengandalkan pendidikan kepada sekolah semata, jelas merupakan pandangan dan sikap yang keliru. Sebab terlalu banyak menaruh harapan, apalagi mengandalkan pendidikan hanya kepada sekolah ternyata tidak selalu memuaskan. Namun anehnya, masyarakat tidak pernah merasa "keceles" hasil sekolah selama ini paling-paling hanya menggerutu.

Konsentrasi masyarakat yang demikian tinggi terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan, hampir-hampir menghilangkan "kesadaran" masyarakat akan hakekat pendidikan itu sendiri. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak lagi memahami apa sesungguhnya pendidikan itu, dan buat apa anaknya dididik. Bahkan, akhir-akhir ini ada kecenderungan masyarakat menilai mutu dan keberhasilan pendidikan berdasarkan ukuran tinggi-rendahnya NEM yang dicapai oleh rata-rata murid. NEM dinilai demikian mahal, sehingga yang pada hakekatnya NEM itu tidak lebih dari sekedar "keputusan pendidikan" telah diangkat menjadi "tujuan pendidikan". Oleh karena itu, mereka mengerahkan segala potensi dan kemungkinan untuk meraih NEM setinggi-tingginya. Sementara itu tujuan hakiki dari pendidikan itu sendiri tidak pernah mereka pahami atau telah terlupakan.

Pada hakekatnya, pendidikan dalam perspektif Nasional-sebagaimana diamanatkan oleh GBHN-adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manifestasinya adalah terbentuknya manusia Indonesia yang sesuai

dengan watak dasarnya, yaitu religius-sosialistis. Dengan demikian, sistem pendidikan yang diidealkan adalah yang mampu membudayakan dan mengaktualisasikan nilai-nilai religius dan sosial.

Pendidikan yang "disakralkan" masyarakat sekarang adalah sistem sekolah. Karakteristik sistem persekolahan adalah terstandardisasi dan normatif menurut metodik pengajaran, maupun birokrasi pengelolaannya. Semuanya tertata dalam batas ruang dan waktu serta jenjang tertentu. Padahal, membudayakan nilai-nilai religius dan sosial merupakan pembentukan jiwa (*character building*) dan pembentukan manusia Indonesia yang religius-sosialistis berarti mewujudkan sikap hidup (*attitude*) pada diri seseorang.

Kedua aspek tersebut -yang merupakan watak dasar manusia yang bersifat fithri- tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang bukan melalui paksaan, melainkan atas dorongan dari dalam (*inner potential*).¹⁴⁾ Proses pertumbuhan dan perkembangan itu memerlukan suatu lingkungan yang kondusif. Sebab, pertumbuhan jiwa dan sikap hidup tidak mungkin terjadi di dalam ruang hampa. Di samping itu, keduanya tidak dapat terwujud hanya dalam waktu sekejap, dan dengan batas ruang dan waktu, melainkan memerlukan proses internalisasi yang berlangsung terus-menerus. Secara operasional, proses internalisasi nilai dan sikap terjadi melalui berbagai media, seperti pengalaman, contoh, adat, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Semuanya ini terjadi pada berbagai institusi yang dalam terminologi pendidikan disebut pusat pendidikan. Pusat-pusat pendidikan yang pokok meliputi; keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Ketiganya mungkin memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi, perbedaan itu harus tetap dalam satu kerangka orientasi, yaitu pendidikan untuk membentuk jiwa dan sikap hidup dan mewujudkan manusia yang religius-sosialistis. Tanpa keserasian dan keterpaduan itu, hakekat pendidikan tidak pernah terwujud.

Konsep tersebut mengimplikasikan bahwa pendidikan harus diwujudkan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terpadu dan serasi. Dengan keterpaduan dan keserasian tiga sentra pendidikan itulah akan terjadi proses pendidikan yang hakiki, bukan pendidikan yang parsial. Dengan demikian, mengandalkan harapan pendidikan kepada sekolah semata, tanpa pendidikan dalam keluarga dan masyarakat yang serasi, sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai *ilusi*. Untuk itu, idealisasi sistem pendidikan kita adalah terciptanya *sistem pendidikan*

¹⁴⁾ M. Amien Rais, *op-cit.* hal. 34.

yang bersifat *keluarga, bersifat sekolah, dan bersifat masyarakat*. Dalam perspektif pendidikan masa depan, menurut hemat saya sistem pondok pesantren yang konsisten memiliki tiga sifat tersebut merupakan alternatif sistem pendidikan yang tepat.